



IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) OLEH DINAS SOSIAL DI PROVINSI GORONTALO

IMPLEMENTATION OF THE PRODUCTIVE ECONOMIC ENTERPRISE (UEP) SOCIAL ASSISTANCE PROGRAM BY THE SOCIAL AFFAIRS AGENCY IN GORONTALO PROVINCE

Alfisander Walangadi^{1*}, Fenti Prihatini Dance Tui², Romy Tantu³

^{1*}Universitas Negeri Gorontalo, Email: alfisanderwalangadi@gmail.com

²Universitas Negeri Gorontalo, Email: fenti@ung.ac.id

³Universitas Negeri Gorontalo, Email: romy.tantu@ung.ac.id

*email koresponden: alfisanderwalangadi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.3000>

Abstrack

This study aims to examine and analyze the implementation of the Productive Economic Enterprise (UEP) Social Assistance Program by the Gorontalo Province Social Agency, viewed through the lens of George C. Edwards III's policy implementation theory, covering the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative research method with a descriptive approach was employed. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. Research informants consisted of the Gorontalo Province UEP Coordinator, the Bone Bolango Regency UEP Coordinator, Social Agency staff, and beneficiary community members. The results indicate that the implementation of the UEP Social Assistance Program by the Gorontalo Province Social Agency is underway but not yet fully optimal. Regarding communication, program dissemination was carried out through cross-sector coordination, assessments, and monitoring; however, information delivery remained uneven across some areas. In terms of resources, program execution was supported by competent personnel, assessment-based information, clear authority, and adequate facilities and infrastructure, though challenges persisted regarding limited training time and the technological proficiency of some beneficiaries. Regarding disposition, implementers demonstrated commitment, responsibility, and responsiveness in executing the program and providing ongoing assistance. Concerning bureaucratic structure, implementation adhered to systematic procedures and was supported by inter-unit coordination and periodic monitoring and evaluation mechanisms; however, the vast operational area and the limited number of facilitators remained challenges.

Keywords: Policy Implementation, Productive Economic Activities (UEP), Social Assistance, George C. Edwards III, Gorontalo Province Social Agency.



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, meliputi aspek komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Koordinator UEP Provinsi Gorontalo, Koordinator UEP Kabupaten Bone Bolango, Pegawai Dinas Sosial, serta masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Bantuan Sosial UEP oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi program telah dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, assessment, dan monitoring, tetapi penyampaian informasi di beberapa daerah masih belum merata. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh SDM yang kompeten, informasi berbasis assessment, kewenangan yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai, namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan waktu pelatihan dan kemampuan teknologi sebagian penerima manfaat. Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas yang baik dalam melaksanakan program serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah mengacu pada prosedur yang sistematis serta didukung koordinasi antarunit dan mekanisme monitoring-evaluasi berkala, namun luasnya wilayah kerja dan keterbatasan jumlah pendamping masih menjadi tantangan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Sosial, George C. Edwards III, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional maupun daerah di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki. Dalam perspektif administrasi publik, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan penanggulangan kemiskinan mengalami perubahan dari pendekatan yang berorientasi pada bantuan semata menuju pendekatan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2017). Pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan. Salah satu program yang telah banyak diterapkan adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberian bantuan yang bersifat produktif berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan berkelanjutan (Kementerian Sosial RI, 2021).

Menurut Ilham (2021), pelaksanaan program UEP mencakup beberapa tahapan penting, yaitu persiapan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, Program UEP tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan modal, tetapi juga menekankan pentingnya proses pemberdayaan masyarakat melalui identifikasi potensi, peningkatan keterampilan, penguatan kapasitas usaha, serta pendampingan berkelanjutan agar masyarakat mampu mengelola usahanya secara mandiri.

Keberhasilan suatu program bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan



dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel tersebut saling memengaruhi dan menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan ekonomi masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian Syam (2022) menunjukkan masih terdapat kendala pada aspek data penerima manfaat dan konsistensi pendampingan. Penelitian Yogita et al. (2020) juga menemukan bahwa implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat sering kali menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia pengelola, pemahaman masyarakat, serta koordinasi antar instansi. Sementara itu, Hermoko (2021) mengungkapkan bahwa faktor disposisi pelaksana sangat menentukan keberhasilan Program UEP bagi lanjut usia potensial.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan daerah. Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan kecenderungan menurun, angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih berada di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo (2025), persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada Maret 2025 tercatat masih cukup tinggi. Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada dasarnya telah berjalan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang difokuskan pada pelaksanaan program di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Fokus penelitian meliputi empat sub fokus: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi dalam implementasi program.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.

Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo yang beralamat di Jalan Brigjen Piola Isa Nomor 1, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dengan fokus analisis pada implementasi Program UEP di Kabupaten Bone Bolango. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 11 bulan sejak Juni 2024 sampai Mei 2025.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari arsip Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, dokumen program, laporan, serta jurnal penelitian yang relevan. Informan penelitian ditentukan secara purposive dan terdiri dari enam orang sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama/Inisial	Jabatan/Status	Keterangan
1	SS	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Koordinator UEP Provinsi Gorontalo
2	AMW	Koordinator UEP Kabupaten	Koordinator UEP Bone Bolango
3	WI	Pegawai Dinas Sosial	Staf pelaksana
4	NL	Penerima Manfaat	Masyarakat penerima bantuan UEP
5	RM	Penerima Manfaat	Masyarakat penerima bantuan UEP
6	KL	Penerima Manfaat	Masyarakat penerima bantuan UEP

Sumber: Data Penelitian, 2025



Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara semi terstruktur kepada seluruh informan; (2) observasi langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan; dan (3) studi dokumentasi berupa arsip, laporan, foto, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program UEP.

Teknik analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yang meliputi tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi; (2) penyajian data, yaitu menyusun informasi yang telah melalui proses reduksi dalam bentuk uraian naratif dan tabel; serta (3) penarikan kesimpulan, yaitu menemukan makna dan pola dari data yang telah dianalisis.

Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, serta dilengkapi dengan member check, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability untuk memastikan kredibilitas, konsistensi, dan objektivitas hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis implementasi Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang meliputi empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut hasil dan pembahasan masing-masing variabel.

Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan salah satu variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Menurut George C. Edwards III, komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada seluruh pihak yang terlibat agar tujuan, isi, dan prosedur kebijakan dapat dipahami secara sama oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif ditandai oleh tiga indikator utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Berdasarkan hasil penelitian, aspek komunikasi dalam implementasi Program UEP secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo kepada pemerintah kabupaten/kota, pendamping sosial, hingga masyarakat penerima manfaat. Dinas Sosial juga melibatkan berbagai instansi sebagai mitra pelaksana agar informasi mengenai program dapat diteruskan secara lebih luas.

Pada indikator transmisi, penyampaian informasi mengenai Program UEP telah dilakukan melalui berbagai media komunikasi, yaitu rapat koordinasi, diskusi kelompok, pendampingan lapangan, serta kegiatan assessment. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial:

"Melakukan peningkatan pemahaman untuk pengentasan kemiskinan dengan mitra kerja sebagai salah satu alat kontrol, pemicu, motivasi, bahkan dalam pelaksanaan pemberian bantuan kita melibatkan CSR. Kita tidak bisa berdiri sendiri, sehingga berkolaborasi dengan Dinas UMKM, Pariwisata, Kesehatan, pihak kampus, dan tokoh masyarakat." (SS, 22 April 2025)

Komunikasi kepada masyarakat juga dilakukan melalui pertemuan langsung. Salah seorang penerima manfaat menyampaikan: "Awalnya saya didatangi langsung oleh mereka, kemudian diminta datang ke kecamatan. Di sana kami diajak berdiskusi oleh pihak Dinas mengenai pelatihan yang akan dilaksanakan." (NL, 22 April 2025)

Pada indikator kejelasan (clarity), informasi yang disampaikan kepada masyarakat relatif mudah dipahami. Hal ini terlihat dari kemampuan penerima manfaat dalam menjelaskan kembali tujuan Program UEP, prosedur pelaksanaan, serta bentuk bantuan yang diterima. Dinas Sosial tidak secara sepihak menentukan bentuk pelatihan, tetapi terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan, minat, dan potensi masyarakat.

Pada indikator konsistensi, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah berupaya menjaga keseragaman penyampaian informasi melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Monitoring dilakukan oleh pendamping sekitar lima kali dalam sebulan disertai laporan pertanggungjawaban setiap bulan. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi masih menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan data



calon penerima manfaat pada beberapa daerah sehingga penyampaian informasi belum dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh wilayah.

Sumber Daya (Resources)

Menurut George C. Edwards III, sumber daya merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan baik dan dikomunikasikan secara jelas, implementasi tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Pada aspek sumber daya manusia, pelaksanaan Program UEP tidak hanya melibatkan aparatur Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain sesuai tugas dan kompetensinya, yaitu Dinas UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, pihak kampus, tokoh masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga mitra swasta. Pendamping UEP memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan identifikasi, assessment, pendampingan selama pelatihan, monitoring, dan pelaporan perkembangan usaha penerima manfaat.

Pada aspek informasi, sebelum menetapkan penerima manfaat, Dinas Sosial bersama pendamping melakukan proses assessment secara langsung kepada masyarakat. Koordinator UEP menyampaikan: "Kita turun langsung ke lapangan bersama pendamping dan pemerintah desa untuk melihat kondisi masyarakat, mencari potensi yang dimiliki dan mengetahui masalah yang sebenarnya." (AMW, 22 April 2025). Selain informasi hasil observasi lapangan, Dinas Sosial juga menggunakan data administrasi berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan.

Pada aspek kewenangan, pembagian telah dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pelaksana. Dinas Sosial bertanggung jawab dalam menentukan kuota penerima manfaat, penganggaran program, penyusunan kegiatan, serta koordinasi, sementara pendamping memiliki kewenangan melakukan pendataan, monitoring, pembinaan, dan penyusunan laporan.

Pada aspek sarana dan prasarana, Dinas Sosial menyediakan tempat pelatihan, narasumber, peralatan praktik, bahan pelatihan, serta bantuan peralatan usaha kepada penerima manfaat berupa mixer, oven, kompor, panci, dan berbagai perlengkapan usaha lainnya. Penerima manfaat mengakui bahwa bantuan tersebut sangat membantu pengembangan usaha mereka. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan berupa waktu pelatihan yang terbatas dan kemampuan teknologi sebagian penerima manfaat yang masih rendah.

Disposisi (Disposition)

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, kemauan, serta tanggung jawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program. Edwards III menegaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila para pelaksana memiliki komitmen yang tinggi, bersikap jujur, responsif, serta memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tujuan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi Program UEP di Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada indikator komitmen, Dinas Sosial berkomitmen melaksanakan program secara optimal melalui kerja sama lintas sektor. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan assessment secara langsung sebelum penetapan penerima manfaat, serta penyesuaian jenis pelatihan berdasarkan identifikasi kebutuhan dan potensi masyarakat.

Pada indikator tanggung jawab, pendamping tidak menghentikan pembinaan setelah pelatihan selesai, tetapi tetap melakukan kunjungan secara berkala. Monitoring dilakukan sekitar lima kali dalam sebulan disertai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Dinas Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menjelaskan: "Kita menggunakan penilaian berdasarkan proses pelatihan selama satu tahun. Apabila penerima manfaat menunjukkan perkembangan yang baik, mereka akan dibantu untuk mendapatkan sertifikat, izin usaha maupun bantuan dari pihak lain." (SS, 22 April 2025)

Pada indikator responsivitas, pelaksana menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan masyarakat selama pelaksanaan program. Meskipun tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan keterbatasan anggaran, pelaksana tetap membuka ruang komunikasi dan menerima berbagai masukan sebagai bahan evaluasi.



Komitmen pendampingan berkelanjutan juga ditegaskan oleh Koordinator UEP: "Kita terus melakukan pendampingan. Jika usaha mereka mengalami stagnasi, kita segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang telah bekerja sama agar usaha mereka tetap berjalan dan berkembang." (AMW, 22 April 2025). Penerima manfaat mengonfirmasi bahwa pendampingan yang diberikan sangat membantu perkembangan usaha mereka.

Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur birokrasi merupakan variabel terakhir dalam teori Edwards III yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang baik ditandai dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, prosedur pelaksanaan yang terstruktur (SOP), serta mekanisme koordinasi antar pelaksana.

Pada aspek pembagian tugas, pelaksanaan Program UEP melibatkan berbagai pihak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menjelaskan bahwa setiap tahapan kegiatan mulai dari rekrutmen peserta, mapping, assessment, identifikasi masalah, pendekatan stakeholder, hingga pelaksanaan kegiatan telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Koordinator UEP menambahkan bahwa pendamping memiliki tugas khusus dalam melakukan pendataan dan identifikasi calon penerima manfaat di lapangan bersama pemerintah desa.

Pada aspek prosedur pelaksanaan, implementasi Program UEP dilaksanakan melalui tahapan yang telah disusun secara sistematis mulai dari persiapan hingga evaluasi. Setiap kegiatan memiliki timeline yang telah disepakati disertai laporan hasil. Walaupun tidak disebutkan secara rinci mengenai dokumen SOP tertulis, pelaksanaan program tetap mengikuti tahapan yang konsisten dan terstruktur.

Pada aspek koordinasi, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo membangun koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program, termasuk Dinas UMKM, Pariwisata, Kesehatan, pihak kampus, tokoh masyarakat, serta CSR. Koordinasi dilakukan secara berkelanjutan melalui mekanisme pelaporan dan rapat evaluasi.

Pada aspek monitoring dan evaluasi, mekanisme ini dilakukan secara rutin oleh pendamping melalui kunjungan langsung. Pendamping memiliki dokumen monitoring yang berisi data perkembangan usaha penerima manfaat meliputi status usaha, aset usaha, omzet, tenaga kerja, serta indikator keberhasilan binaan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa luasnya wilayah Provinsi Gorontalo yang menyebabkan pelaksanaan monitoring memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar, serta proses koordinasi dengan berbagai instansi yang memerlukan waktu relatif lebih panjang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Dinas Sosial Provinsi Gorontalo pada dasarnya telah berjalan dengan baik apabila ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Keempat variabel implementasi menunjukkan hubungan yang saling melengkapi dan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program.

Pada aspek komunikasi, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo telah membangun komunikasi yang cukup efektif melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pendamping sosial, serta masyarakat penerima manfaat. Informasi mengenai tujuan program, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, dan jenis bantuan telah disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi. Namun demikian, pemerataan penyampaian informasi di seluruh wilayah masih perlu ditingkatkan.

Aspek sumber daya menunjukkan bahwa ketersediaan SDM yang kompeten dari berbagai unsur, informasi yang akurat melalui assessment, kewenangan yang jelas, serta dukungan sarana dan prasarana telah memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program. Meski demikian, keterbatasan waktu pelatihan dan kemampuan teknologi sebagian penerima manfaat masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Aspek disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen, tanggung jawab, dan kepedulian yang tinggi terhadap pelaksanaan Program UEP. Pendampingan berkelanjutan setelah



bantuan diberikan menjadi bukti nyata komitmen pelaksana. Sikap responsif terhadap masukan masyarakat juga turut mendukung keberhasilan implementasi program.

Aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa implementasi Program UEP telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, koordinasi lintas sektor, prosedur pelaksanaan yang terstruktur, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berjalan secara berkala. Namun, luasnya wilayah kerja dan keterbatasan jumlah pendamping masih menjadi tantangan yang perlu ditangani.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah: (1) meningkatkan kualitas komunikasi dan intensitas sosialisasi program agar informasi dapat merata di seluruh wilayah; (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pendamping melalui pelatihan dan bimbingan teknis; (3) memperkuat pendampingan berkelanjutan tidak hanya pada saat pelatihan tetapi juga pada tahap pengembangan usaha; (4) memperkuat koordinasi antarinstansi dan pembaruan data calon penerima manfaat secara berkala; serta (5) mendorong masyarakat penerima manfaat untuk terus meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan bantuan secara optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. (2025). *Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2025*. Gorontalo: BPS Provinsi Gorontalo.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Pearson.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Friedlander, W. A. (1961). *Introduction to Social Welfare*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Henry, N. (2004). *Public Administration and Public Affairs* (9th ed.). Prentice Hall.
- Hermoko, R. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia Potensial di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 1(3), 124–135.
- Ilham, N., & Muhtadi. (2023). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Suku Dinas Sosial Jakarta Barat untuk Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin. *Jurnal Community Online*, 4(1).
- Isnaeni., Syam, A., Hasan, M., & Said, M. I. (2022). Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Intelektiva*, 4(3), 9–16.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman/Petunjuk Teknis Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Mawardani, W. (2025). Efektivitas Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Selat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(2).
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publications.
- Nasrullah., Misbah, T. L., & Murdani. (2026). Analisis Keberhasilan Program UEP Melalui Model CIPP di Kota Banda Aceh. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 107–124.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. G. (1984). *Modern Public Administration*. Harper & Row.



- Pairan. (2025). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*.
- Pasolong, H. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Subarsono. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.
- Waldo, D. (1948). *The Administrative State*. The Ronald Press Company.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(3), 247–256.